

# INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI)

**Tema:**  
**Statistik Sosial**

# PENDAHULUAN



Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan ukuran pembangunan politik yang digunakan pemerintah pada RPJMN 2010 – 2014, 2015 – 2019, serta 2020–2024.



IDI merupakan kerja bersama instansi pemerintah yaitu Kemenkopolhukam, BPS, Bappenas, Kemendagri, serta Pemerintah Daerah.



IDI adalah *Fact-Based Information*, karena sebagian besar datanya berasal dari kejadian nyata yang bisa diobservasi dan diintervensi.



IDI disusun dengan melibatkan elemen masyarakat di luar pemerintah seperti perguruan tinggi dan LSM. Keterlibatan ini dilakukan pada penyusunan indikator, verifikasi data, serta FGD di pusat dan provinsi.



**Target IDI (metode baru) dalam RKP**

**79,58**

*pada tahun 2024*

# KILAS BALIK IDI 2009 - 2020



IDI merupakan ukuran untuk memotret kualitas perilaku demokrasi pemerintah dan masyarakat di sebuah wilayah. IDI diukur khusus di Indonesia, sehingga berbeda cara pengukurannya dengan indeks-indeks lain yang unit analisisnya antar negara.



IDI 2009 – 2020 telah menjadi rujukan untuk pembangunan politik nasional dan daerah. IDI memiliki keunggulan memiliki data dan informasi detail karena dikumpulkan melalui kasus dan data riil. Dengan data tersebut dinamika kualitas demokrasi lebih mudah dijelaskan dan diintervensi (diperbaiki) oleh pemerintah dan masyarakat.

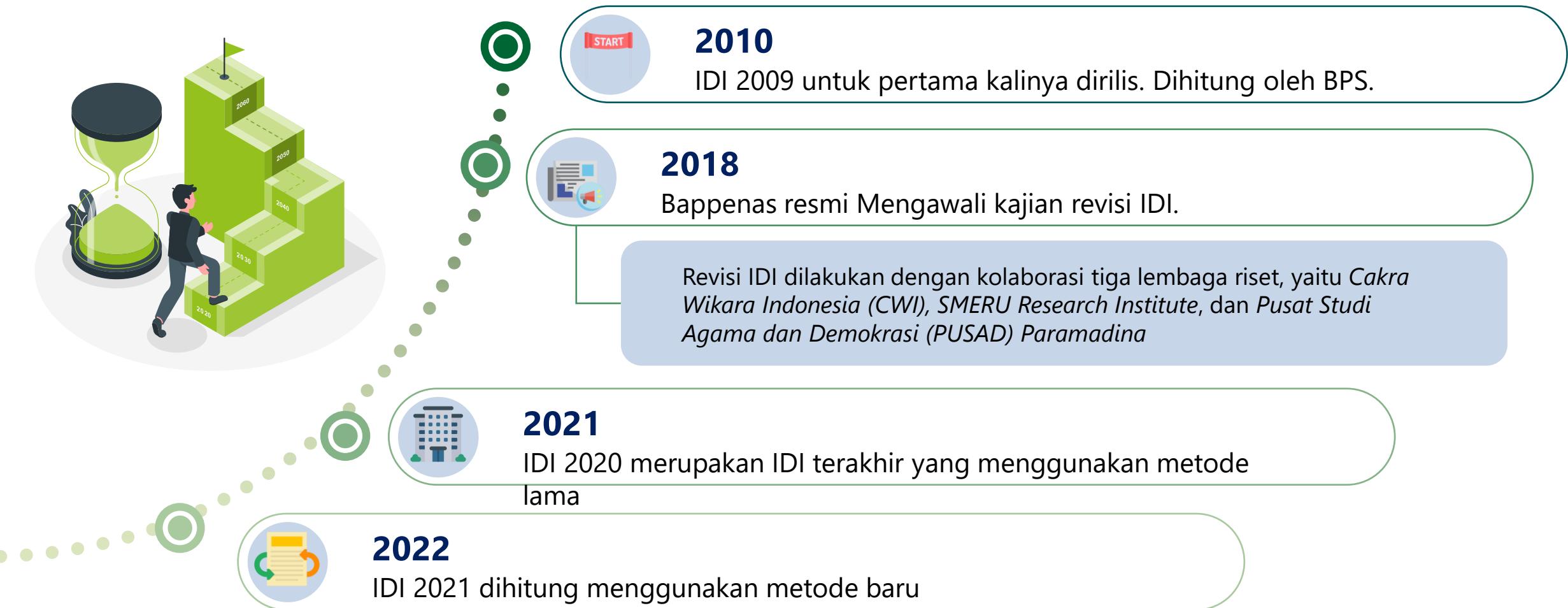


Dalam perjalannya IDI memperoleh masukan dari akademisi, masyarakat, pemerintah daerah, K/L, hingga dari DPR. Sebagai tindak lanjut masukan-masukan tersebut diinventarisir beriringan dengan evaluasi pada data dan hasil IDI yang telah dihitung.

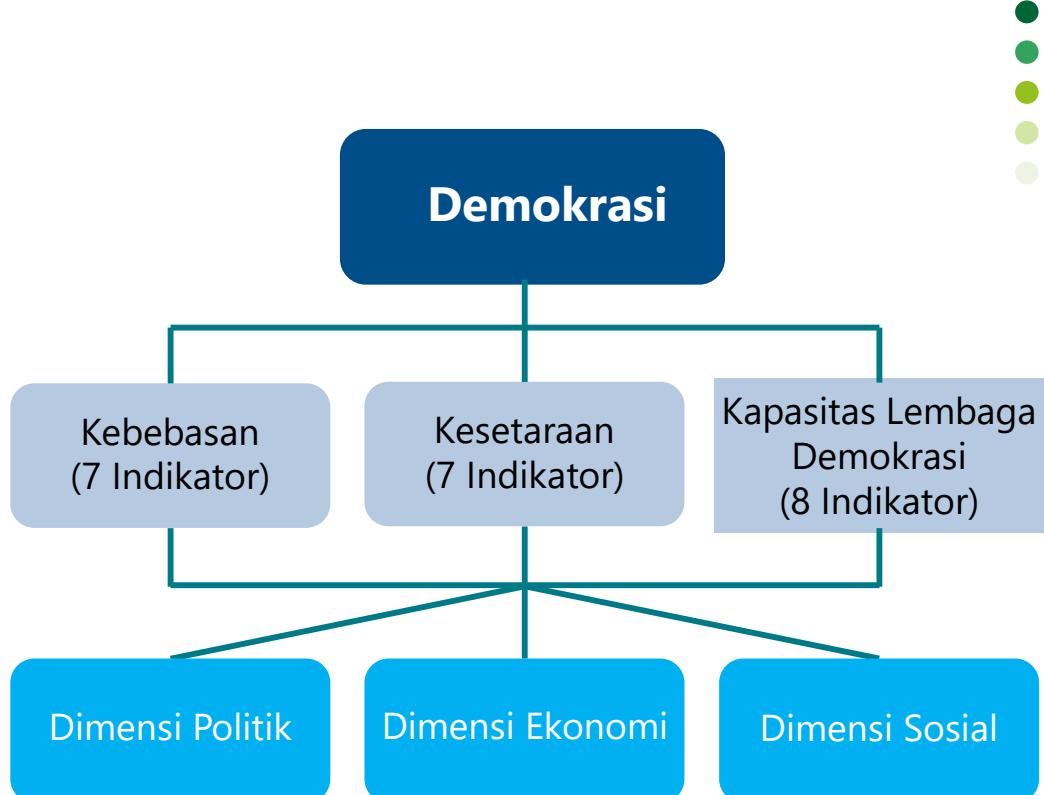


IDI diharapkan dapat menjadi ukuran demokrasi yang sesuai dengan falsafah Pancasila sehingga arah pembangunan politik Indonesia tidak menyimpang dari ideologi bangsa. Dengan demikian ukuran-ukuran yang digunakan IDI diharapkan mengandung nilai-nilai penting dalam Pancasila.

# REVISI METODOLOGI IDI



# ASPEK IDI METODE BARU



## **Kebebasan**

Proses sejauh mana sektor-sektor yang berbeda memperoleh independensi dan otonomi dari kekuatan politik otoriter lama dan kemudian dapat menetapkan kepentingan mereka sendiri.



## **Kesetaraan**

Proses sejauh mana kelompok minoritas atau pun sub-altern secara substansial dapat memiliki akses pada sumber daya di berbagai sektor dan dapat menikmati kesetaraan dalam mengakses sumber daya dan kekuasaan. Ekualisasi adalah sebuah proses transformasi kekuasaan di setiap bidang yaitu politik, ekonomi maupun sosial (masyarakat sipil).



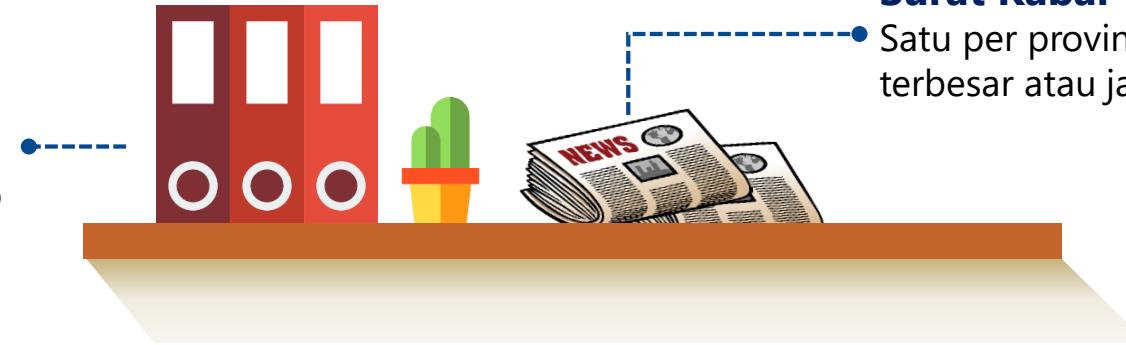
## **Kapasitas Lembaga Demokrasi**

Proses sejauh mana institusi/lembaga demokrasi berfungsi dan bekerja menjamin prinsip demokrasi dalam tata kelola politik, ekonomi, dan sosial.

# SUMBER DATA

## Dokumen

Berupa Perda, Pergub,  
Perbup, Surat Edaran, dsb



## Focus Group Discussion (FGD)

Untuk mengkonfirmasi dan menambah informasi dari *stakeholder*



## Surat Kabar

Satu per provinsi dengan oplah terbesar atau jangkauan terluas

## Big Data

Scraping data dilakukan pada 7 portal berita *online* (*detik, Kompas, antara, tirto, kumparan, jpnn, tribunnews*)



# PENGHITUNGAN INDEKS

## Penimbang



- Penimbang indikator didapatkan dengan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP).
- AHP dilakukan oleh para ahli dan praktisi yang memiliki pengalaman, pengetahuan dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik.

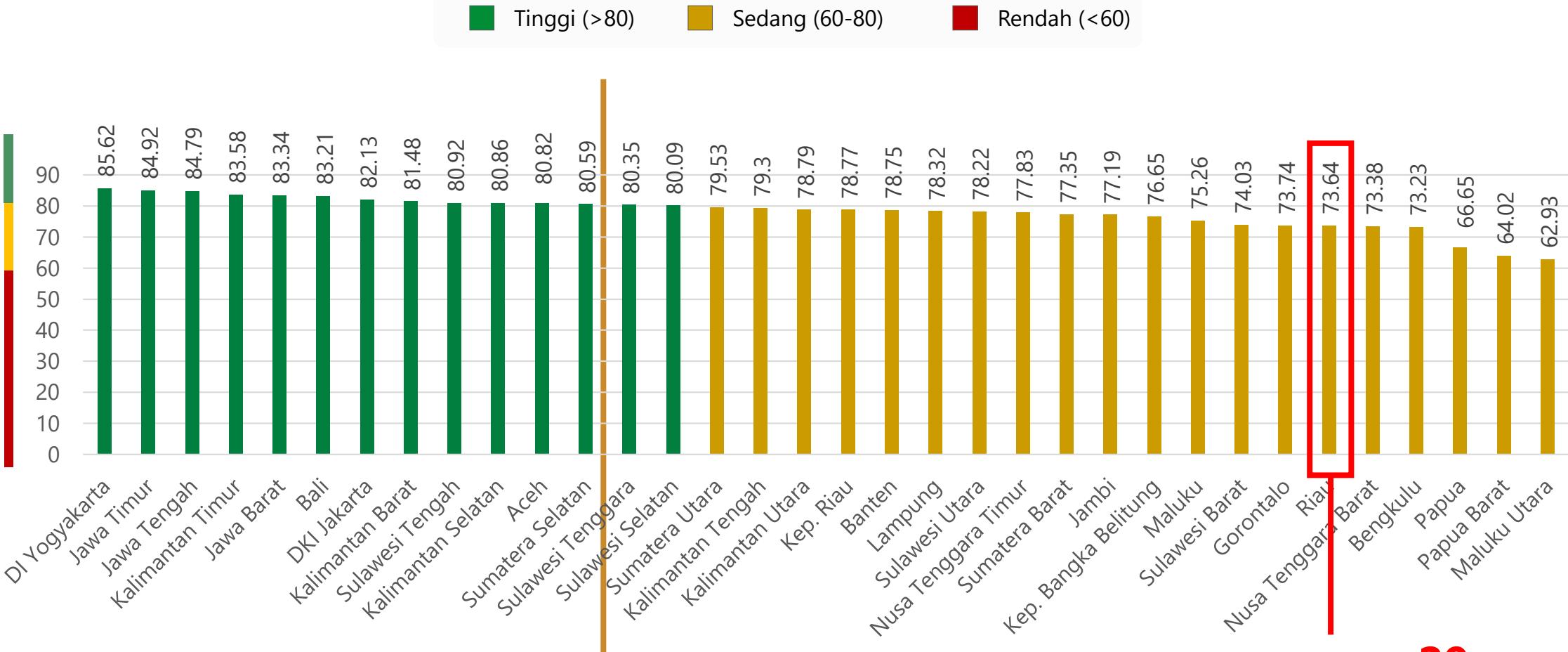
## Indeks yang Dihasilkan



IDI metode baru terdiri dari tiga angka indeks, yaitu:

1. IDI tingkat provinsi,
2. IDI tingkat pusat, dan
3. IDI tingkat nasional sebagai gabungan dari nilai aspek IDI provinsi dan pusat.

# IDI menurut PROVINSI, 2022



**IDI NASIONAL  
sebesar 80,41**

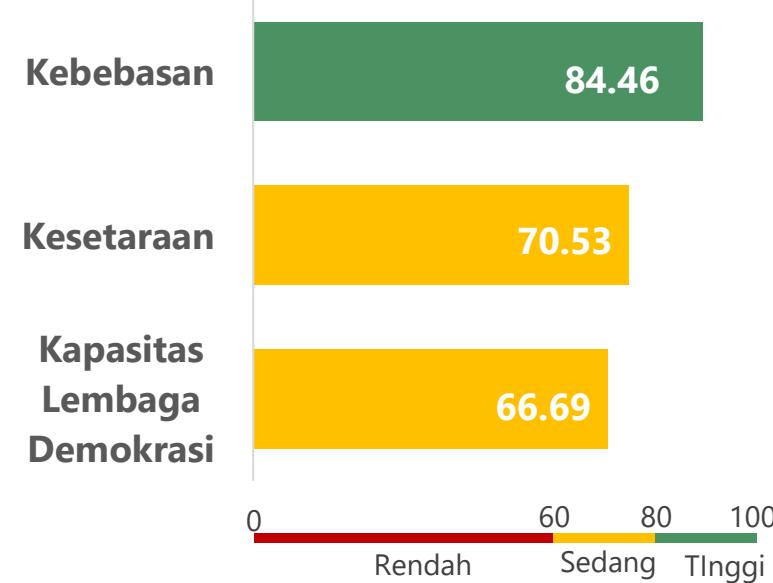
**Peringkat ke-29  
dari 34 Provinsi  
se-Indonesia**

# IDI PROVINSI RIAU, 2022

**IDI  
[PROVINSI RIAU]**  
**73,64**  
*pada tahun 2022  
dan berkategori  
**SEDANG***



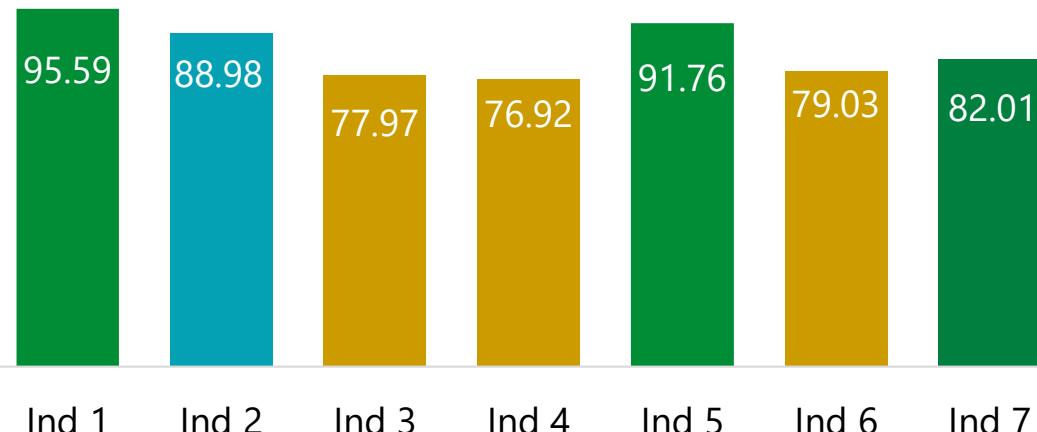
## ASPEK IDI PROVINSI RIAU, 2022



# SKOR INDIKATOR ASPEK IDI PROVINSI RIAU, 2022

## ASPEK KEBEBASAN

Aspek dengan capaian tertinggi terdapat pada Indikator 2 dan 3 sementara aspek dengan capaian terendah terdapat pada Indikator 6



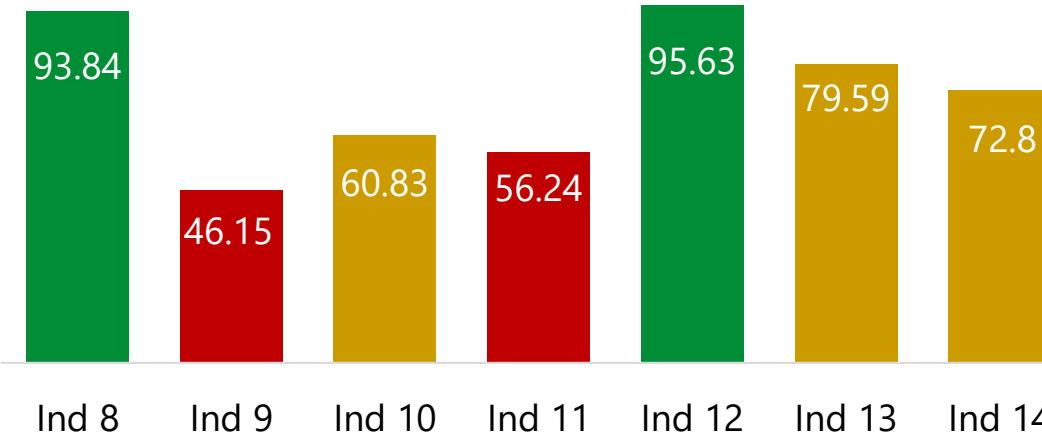
█ Tinggi (>80)    █ Sedang (60-80)    █ Rendah (<60)

| Indikator |  |
|-----------|--|
| 1         | Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara                   |
| 2         | Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat                     |
| 3         | Terjaminnya kebebasan berkeyakinan   |
| 4         | Terjaminnya Kebebasan Berkumpul, Berserikat, Berekspresi, Berpendapat, dan Berkeyakinan Dalam Setiap Kebijakan |
| 5         | Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat                             |
| 6         | Pemenuhan hak-hak pekerja  |
| 7         | Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya  |

# SKOR INDIKATOR ASPEK IDI PROVINSI RIAU, 2022

## ASPEK KESETARAAN

Aspek dengan capaian tertinggi terdapat pada Indikator 9 sementara aspek dengan capaian terendah terdapat pada Indikator 11



Tinggi (>80)

Sedang (60-80)

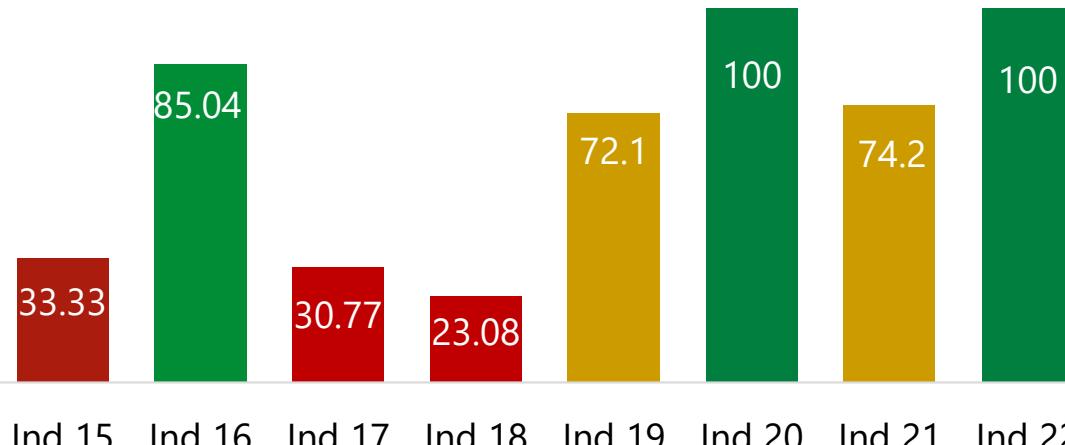
Rendah (<60)

| Indikator  |
|--|
| 8 Kesetaraan gender  |
| 9 Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan |
| 10 Anti monopoli sumber daya ekonomi   |
| 11 Akses warga miskin pada perlindungan dan Jaminan sosial                             |
| 12 Kesetaraan Kesempatan Kerja Antar Wilayah   |
| 13 Akses Masyarakat terhadap Informasi Publik  |
| 14 Kesetaraan dalam pelayanan dasar  |

# SKOR INDIKATOR ASPEK IDI PROVINSI RIAU, 2022

## ASPEK KAPASITAS LEMBAGA DEMOKRASI

Aspek dengan capaian tertinggi terdapat pada Indikator 20 dan 22 sementara aspek dengan capaian terendah terdapat pada Indikator 15



Tinggi (>80)

Sedang (60-80)

Rendah (<60)

| Indikator |   |
|-----------|---|
| 15        | Kinerja Lembaga legislatif  |
| 16        | Kinerja lembaga yudikatif   |
| 17        | Netralitas Penyelenggara Pemilu   |
| 18        | Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah                |
| 19        | Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat |
| 20        | Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah                  |
| 21        | Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik  |
| 22        | Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik  |



BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI RIAU



SPEKTRAL  
SISTEM PEMBINAAN STATISTIK SEKTORAL

BerAKHLAK  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# TERIMA KASIH



• • •

[www.riau.bps.go.id](http://www.riau.bps.go.id)